

MEMBANGUN KESADARAN KRITIS: PENDIDIKAN PEMBEBASAN SEBAGAI SOLUSI TERHADAP MARGINALISASI ORANG ASLI PAPUA

Satria Reza Karnoto

Institut Agama Kristen Negeri Manado

Email : satriarezakarnoto@gmail.com

Abstrak : Ketimpangan yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) dalam sektor pendidikan masih menjadi masalah utama meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembangunan. Sistem pendidikan yang bersifat sentralistik dan tidak memperhatikan nilai serta kondisi lokal justru memperdalam ketidaksetaraan struktural. Melalui pendekatan analisis kritis, ditemukan bahwa konsep pendidikan pembebasan yang dikembangkan oleh Paulo Freire dapat menjadi jawaban atas persoalan ini. Model pendidikan ini menekankan dialog dan partisipasi aktif sehingga OAP dapat berperan sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang berakar pada budaya lokal berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran kritis yang memungkinkan mereka memahami sekaligus mengubah realitas ketertindasan yang dialami. Agar pendekatan ini berhasil diterapkan, perlu adanya perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan yang memberi ruang partisipasi kepada masyarakat adat, terutama dalam penyusunan kurikulum dan pengambilan keputusan pendidikan.

Kata Kunci : Kesadaran Kritis, Ketimpangan Struktural, Kurikulum Berbasis Lokal, Orang Asli Papua, Pendidikan Transformatif,

Abstrack : *Educational disparities affecting Indigenous Papuans continue to pose significant challenges, even in the presence of numerous national development initiatives. The prevailing centralized educational model fails to reflect the local context, thereby perpetuating existing structural injustices. A critical evaluation of this issue suggests that Paulo Freire's theory of liberating education presents a promising path forward. This method, rooted in dialogue and participatory engagement, empowers Indigenous learners to become proactive agents within their own educational journeys. By embracing a culturally responsive educational approach, it fosters critical awareness that allows communities to identify and dismantle the systems that marginalize them. For this approach to be effective, it requires comprehensive educational policy reforms that ensure the inclusion of Indigenous voices in curriculum development and decision-making processes.*

Keyowrds : *Digital Literacy, Digital Media, and Christian Religious Education.*

PENDAHULUAN

Papua hingga saat ini masih bergulat dengan permasalahan besar berupa marginalisasi sistemik terhadap Orang Asli Papua (OAP) dalam berbagai sektor, terutama dalam bidang pendidikan. Berbagai program dan kebijakan, termasuk Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan, nyatanya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat asli Papua. Alih-alih memberikan solusi, pendekatan pembangunan yang selama ini diterapkan sering kali tidak mempertimbangkan budaya, nilai, dan identitas lokal OAP. Penelitian LIPI (2019) menyoroti bahwa pembangunan di Papua kerap gagal menysasar kebutuhan komunitas lokal, bahkan cenderung mengabaikan kearifan lokal yang penting bagi kelangsungan budaya dan identitas OAP, sehingga menyebabkan depopulasi dan krisis jati diri (Pamungkas et al., 2022). Marginalisasi semacam ini bukan hanya berdampak pada rendahnya kualitas hidup, tetapi juga memperparah kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Imbasnya, muncul gejala

berupa ketidakpuasan, tuntutan pemisahan diri, dan konflik horizontal di tengah masyarakat Papua (Tifa Foundation, 2019)¹. Di tengah kondisi ini, pendidikan sejatinya dapat menjadi sarana transformatif yang mampu memerdekakan dan memberdayakan OAP, bukan justru memperkuat struktur ketidakadilan yang sudah lama terjadi.

Sayangnya, sistem pendidikan di Papua masih terjebak dalam model sentralistik yang cenderung seragam dan kurang memperhatikan konteks lokal. Kurikulum yang diterapkan tidak disesuaikan dengan realitas kehidupan dan budaya masyarakat Papua. Akibatnya, sistem ini gagal menjawab kebutuhan riil OAP. Berbagai studi menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan di Papua bukan terjadi secara alamiah, melainkan hasil dari kebijakan yang diskriminatif serta minimnya sensitivitas terhadap kondisi lokal (Nainggolan, 2024).² Hal ini tercermin dalam berbagai indikator seperti tingginya angka putus sekolah, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, hingga fasilitas pendidikan yang tidak layak, khususnya di daerah-daerah pedalaman. Dalam sudut pandang Paulo Freire (1970), pendidikan semacam ini merupakan bentuk penindasan karena menjadikan peserta didik sebagai objek pasif yang hanya menerima informasi tanpa diajak berpikir kritis atau terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (Kompasiana, 2015)³. Pendidikan semacam itu gagal menciptakan ruang pembebasan yang dapat membangun kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Gagasan pendidikan pembebasan dari Freire menawarkan alternatif pendekatan yang sangat relevan untuk Papua.

Pendidikan dalam pandangan Freire haruslah bersifat dialogis dan partisipatif, di mana peserta didik dilibatkan sebagai subjek yang aktif dan sadar akan realitas sosialnya. Mereka diajak untuk menganalisis, memahami, dan berupaya mengubah struktur ketidakadilan yang menjerat mereka (Freire, 1970)⁴. Dalam konteks Papua, ini berarti pendidikan harus dibangun di atas landasan budaya, pengalaman, dan nilai-nilai lokal OAP. Peserta didik perlu diberi ruang untuk menyuarakan pengalaman mereka, mengenali ketidakadilan yang mereka hadapi, serta diberikan dorongan untuk memperjuangkan perubahan. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pendidikan yang kontekstual dan berbasis budaya lokal dapat membangun kesadaran kritis serta meningkatkan daya tawar OAP dalam menghadapi dinamika pembangunan (Pamungkas et al., 2022).

Tentu saja, penerapan pendidikan pembebasan di Papua tidak mudah. Berbagai tantangan struktural seperti kebijakan yang masih berorientasi pusat, minimnya tenaga pendidik yang terlatih dalam pendekatan kritis, serta resistensi dari pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan kondisi status quo menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, implementasi pendidikan pembebasan harus dibarengi dengan reformasi kebijakan pendidikan, pelibatan aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, serta pengembangan kurikulum yang relevan dan berpihak pada kepentingan lokal (Pamungkas et al., 2022; Tifa Foundation, 2019). Dengan pendekatan ini, pendidikan di Papua dapat bertransformasi menjadi ruang yang benar-benar membebaskan, bukan sekadar

¹ Tifa Foundation. (2019). *Pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi Papua*.

² Nainggolan, A. (2024,). *Deklarasi kebenaran di balik retorika pembangunan Papua*. Kompasiana

³ Kompasiana. (2015, Juni 25). *Menggugat pendidikan penindasan di Tanah Papua*.

⁴ Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.

perpanjangan tangan dari sistem yang menindas.

Artikel ini disusun untuk mengkaji secara kritis dinamika marginalisasi yang dialami oleh Orang Asli Papua dalam konteks pembangunan dan pendidikan. Selain itu, Artikel ini bertujuan mengangkat pendidikan pembebasan sebagai pendekatan strategis untuk membangun kesadaran kritis dan memberdayakan OAP secara menyeluruh. Tujuan pertama adalah mengungkap akar penyebab dari marginalisasi terhadap OAP, yang berakar dari kebijakan pembangunan serta sistem pendidikan yang belum inklusif dan sering kali mengabaikan konteks lokal. Dengan merujuk pada data empiris dan studi literatur yang relevan, Artikel ini berupaya memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana marginalisasi tersebut terjadi dan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat OAP (Pamungkas et al., 2022; LIPI, 2019). Tujuan kedua adalah mengevaluasi secara mendalam bagaimana peran pendidikan formal di Papua—apakah selama ini justru memperkuat ketimpangan, atau mampu menjadi sarana pemberdayaan. Dalam hal ini, perhatian akan difokuskan pada bagaimana kurikulum, metode pengajaran, serta lingkungan belajar di sekolah-sekolah mempengaruhi posisi sosial dan masa depan OAP (Nauw, 2025).

Selanjutnya, Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan pendidikan pembebasan yang diusulkan oleh Paulo Freire dan mengkaji penerapannya dalam konteks Papua. Pendidikan model ini dianggap mampu menumbuhkan kesadaran kritis, menjaga dan menguatkan identitas budaya lokal, serta meningkatkan partisipasi aktif OAP dalam pembangunan (Freire, 1970; Tifa Foundation, 2019). Tujuan keempat adalah merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah konkret penerapan pendidikan pembebasan yang sesuai dengan konteks budaya Papua. Diharapkan strategi ini dapat menjadi panduan bagi para pendidik, pembuat kebijakan, serta komunitas lokal dalam membangun sistem pendidikan yang berpihak pada OAP. Terakhir, Artikel ini bertujuan membuka ruang dialog yang kritis dan konstruktif antara para akademisi, praktisi pendidikan, dan pemangku kebijakan. Diharapkan, melalui pendidikan yang reflektif, kontekstual, dan partisipatif, OAP dapat dibekali dengan kesadaran kritis dan keberanian untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara bermartabat dan berkelanjutan. Dengan demikian, Artikel ini tidak sekadar menjadi kajian teoritis, tetapi juga menjadi suara advokasi untuk perubahan nyata dalam sistem pendidikan dan pembangunan di Papua.

Metode Pelaksanaan

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menelusuri dan menjelaskan secara menyeluruh dinamika marginalisasi terhadap Orang Asli Papua (OAP) serta menggambarkan bagaimana pendidikan pembebasan dapat menjadi strategi solusi yang relevan. Dengan metode deskriptif-analitis, penulis dapat mengeksplorasi berbagai teori, kebijakan, dan praktik pendidikan yang berhubungan langsung dengan upaya pemberdayaan OAP dalam kerangka sosial-politik Papua (Sugiyono, 2017).⁵Pendekatan ini juga memberikan keleluasaan untuk mengintegrasikan data dari beragam referensi sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan studi, serta dokumen kebijakan yang memperkuat kajian kritis Artikel ini.

Dalam menganalisis data, digunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis

⁵ Sugiyono. (2017). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

tematik. Melalui pendekatan ini, penulis mampu menemukan pola dan tema utama yang konsisten dalam berbagai literatur, seperti pola marginalisasi yang dialami OAP, potensi pendidikan sebagai alat pemberdayaan, dan prinsip-prinsip pendidikan pembebasan yang dapat diterapkan secara kontekstual. Teknik analisis tematik memfasilitasi penataan data secara terstruktur, sehingga penulis dapat menyusun narasi ilmiah yang utuh dan logis, sekaligus menunjukkan bagaimana pendidikan yang bersifat kritis dapat memperkuat posisi OAP dalam menghadapi ketidakadilan struktural (Krippendorff, 2018)⁶. Penulis juga menerapkan pendekatan reflektif-kritis dalam penulisan, yang menitikberatkan pada pentingnya kesadaran sebagai dasar perubahan sosial. Hal ini mengacu pada pemikiran Paulo Freire (1970) yang menekankan bahwa pendidikan sejati adalah praxis—yakni tindakan reflektif yang menghasilkan transformasi nyata. Oleh karena itu, Artikel ini tidak semata-mata bersifat informatif, tetapi juga mendorong pembaca untuk berpikir secara normatif dan bertindak secara preskriptif. Tujuannya adalah menghasilkan rekomendasi strategis demi mewujudkan sistem pendidikan yang kontekstual, inklusif, dan mampu memberdayakan komunitas asli di Papua. Struktur penulisan Artikel ini disusun secara sistematis agar memudahkan pemahaman pembaca. Dimulai dari pendahuluan, kajian literatur, metode penulisan, pembahasan, hingga bagian kesimpulan dan saran. Setiap bagian dirancang untuk menunjukkan keterkaitan antara permasalahan marginalisasi, pentingnya pendidikan pembebasan, dan upaya pemberdayaan OAP.

Hasil Dan Pembahasan

secara mendalam bentuk-bentuk marginalisasi yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP), serta menawarkan pendidikan pembebasan sebagai pendekatan strategis dalam merespons realitas tersebut. Marginalisasi yang dihadapi OAP tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, melainkan mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya yang berlapis-lapis. Kondisi ini secara sistemik menghambat mereka dalam mengakses hak-hak dasar dan terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Berdasarkan laporan dari Suara Papua (2024), ketimpangan akses terhadap layanan sosial dan politik, diskriminasi, serta keterbatasan dalam pendidikan merupakan penyebab utama semakin dalamnya jurang ketertinggalan OAP⁷. Sebagai contoh, dominasi masyarakat pendatang dalam struktur pemerintahan dan birokrasi di Papua mengakibatkan pelayanan publik yang tidak berpihak pada kebutuhan OAP.

Dalam ranah pendidikan, kualitas layanan yang diterima oleh OAP masih tergolong rendah. Laporan terbaru dari BRIN (2025) menunjukkan bahwa banyak sekolah di Papua menghadapi masalah serius seperti minimnya kehadiran guru, kurangnya fasilitas penunjang belajar, serta kurikulum yang tidak sesuai dengan realitas budaya lokal⁸. Persoalan ini diperparah oleh diskriminasi sistemik yang membatasi OAP untuk berkembang dalam pendidikan maupun dunia kerja (Anak Tanah, 2024).⁹ Sistem pendidikan nasional yang

⁶ Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.

⁷ Suara Papua. (2024). 23 tahun Otsus, Orang Asli Papua termarginalkan.

⁸ BRIN. (2025, Januari). BRIN ungkap masalah pendidikan di Papua Barat.

⁹ Anak Tanah. (2024). *Diskriminasi dan marginalisasi: Orang Asli Papua*

cenderung seragam dan berpusat di Jakarta justru gagal mengakomodasi keberagaman lokal, dan bahkan mengalienasi peserta didik dari realitas sosial mereka. Paulo Freire (1970) dalam konsep pendidikan pembebasannya mengajarkan bahwa pendidikan harus dialogis, partisipatif, dan memungkinkan siswa untuk merenungkan kondisi sosial yang mereka alami serta mendorong mereka menjadi pelaku perubahan. Konsep ini sangat relevan untuk konteks Papua yang membutuhkan model pendidikan yang responsif terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakatnya.

Pendidikan pembebasan di Papua perlu dibangun di atas fondasi nilai-nilai budaya dan pengalaman hidup OAP. Sebagaimana diungkapkan oleh Pamungkas, Oktafiani, dan Imbhiri (2022), pendidikan yang terhubung dengan kearifan lokal dan pengalaman sosial OAP mampu memperkuat rasa identitas dan memperbesar kapasitas mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Pendidikan pembebasan tidak hanya mengajarkan keterampilan dan informasi, tetapi juga membekali peserta didik dengan keberanian berpikir kritis terhadap struktur ketidakadilan. Pendidikan ini sekaligus menjadi wadah untuk membangun solidaritas sosial dan kesadaran politik, tempat OAP dapat memahami sejarah perjuangan mereka serta memperjuangkan hak-haknya secara kolektif (Tifa Foundation, 2019).

Secara keseluruhan, pendidikan pembebasan dapat menjadi pendekatan transformatif untuk memerangi marginalisasi sistemik yang dialami OAP. Dengan pendidikan yang bersandar pada budaya lokal dan diarahkan untuk perubahan sosial, OAP tidak hanya belajar menjadi penerima kebijakan, tetapi dapat tampil sebagai subjek perubahan yang memperjuangkan hak dan martabatnya secara mandiri. Artikel ini menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar sarana mentransfer ilmu, tetapi juga alat perjuangan yang mampu merombak struktur sosial yang menindas. Oleh sebab itu, inisiatif untuk mengembangkan pendidikan pembebasan di Papua perlu menjadi agenda prioritas dalam menciptakan keadilan sosial yang sejati dan memastikan bahwa pembangunan di Papua berlangsung secara inklusif dan berkeadilan.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa marginalisasi yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) merupakan permasalahan yang bersifat struktural dan kompleks, mencakup berbagai dimensi sosial, ekonomi, politik, serta budaya. Kebijakan pembangunan yang selama ini diterapkan seringkali tidak menyentuh kebutuhan dasar OAP, bahkan justru memperparah ketimpangan yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Pamungkas, Oktafiani, dan Imbhiri (2022) serta laporan dari Tifa Foundation (2022), arah pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat asli Papua telah berkontribusi pada tergerusnya identitas budaya mereka. Sistem pendidikan yang berlaku pun masih kaku, tersentralisasi, dan tidak menyatu dengan realitas lokal, sehingga belum mampu menumbuhkan kesadaran kritis atau memberdayakan OAP dalam menghadapi ketidakadilan.

Pendidikan pembebasan yang digagas oleh Paulo Freire (1970) hadir sebagai pendekatan alternatif yang menawarkan pendidikan dialogis, reflektif, dan partisipatif. Konsep ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar, yang diajak untuk menyadari kondisi sosial mereka dan terlibat dalam perubahan yang membebaskan. Dalam konteks Papua, pendidikan seperti ini harus dibangun berdasarkan nilai-nilai lokal, sejarah, serta pengalaman hidup OAP, agar dapat memperkuat identitas mereka dan mendorong keterlibatan dalam pembangunan. Meskipun demikian, implementasi pendidikan pembebasan

tidaklah mudah. Masih terdapat hambatan besar, seperti sistem kebijakan pendidikan yang sentralistik, keterbatasan tenaga pendidik yang memahami konteks Papua, serta adanya kepentingan pihak-pihak tertentu yang enggan melepaskan kontrol atas sistem yang ada..

Referensi

- Anak Tanah. (2024). Diskriminasi dan marginalisasi: Orang Asli Papua
- BRIN. (2025, Januari). BRIN ungkap masalah pendidikan di Papua Barat. Kompas.com.
- Elmslie, J., & Web-Ganon, C. (2010). The slow-motion genocide in West Papua.
- Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.
- Kompasiana. (2015). Menggugat pendidikan penindasan di Tanah Papua.
- Kompasiana. (2025). Papua Barat Daya dan marginalisasi orang Papua di Kota Sorong.
- Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). Sage Publications.
- LIPI. (2019). Studi terhadap marginalisasi dan depopulasi di Tanah Papua.
- Nainggolan, A. (2024, Desember 3). Deklarasi kebenaran retorika di balik pembangunan Papua. Kompasiana.
- Nauw, F. (2025, Maret 30). Membangun pendidikan bermutu di Tanah Papua: Pembelajaran berbasis bukti dan literasi riset. Kabarsulsel Indonesia.
- Nauw, F. (2025, April 23). Membangun pendidikan bermutu di Tanah Papua: Pembelajaran berbasis bukti dan literasi riset. Kompasiana.
- Pamungkas, C., Oktafiani, I., & Imbhiri, L. (2022). Makna pembangunan bagi orang asli Papua: Studi terhadap marginalisasi dan depopulasi di Tanah Papua. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional,
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suara Papua. (2024). 23 tahun Otsus, Orang Asli Papua termarginalkan.
- Tifa Foundation. (2019). Pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi Papua.
- Universitas Pendidikan Indonesia. (2021). Bab III Metodologi penelitian. UPI Repository.